

# Kadarkum, Dorong Kepatuhan Hukum Masyarakat

BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan kembali mengukuhkan kelurahan binaan sadar hukum dan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum). Sebelumnya, sudah ada enam kelurahan binaan sadar hukum yang lebih dulu terbentuk pada 2021. Kini, bertambah lagi enam kelurahan pada tahun ini.

Total, sudah ada 12 kelurahan binaan sadar hukum di Kota Minyak. Tujuan mendorong kepatuhan hukum di masyarakat. Strategi melalui pembentukan kadarkum hingga tingkat kota. Balikpapan menjadi daerah terbanyak memiliki 12 kelurahan sadar hukum di Kaltim.

"Padahal, di kabupaten/kota lain di Kaltim bahkan ada yang belum punya," kata Kabag Hukum Setkot Balikpapan Elizabeth Toruan. Dia menambahkan, pengukuhan ini bisa membawa Balikpapan naik ke skala nasional dan meraih penghargaan dari kementerian.

Biasa pada tahun-tahun sebelumnya, Balikpapan hanya melakukan pembinaan dan lomba tingkat kota. Namun, kini Balikpapan berhasil naik di level provinsi. "Tahun ini, kami dikukuhkan oleh kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM," bebernya.

Saat ini, Balikpapan maju di tingkat nasional. Meski masih perlu persiapan untuk mencapai target tersebut. Eliz bercerita, terdapat tahapan verifikasi berkaitan pelaksanaan kadarkum. Jika berhasil melewati status binaan, maka akan meningkat menjadi kadarkum.

Verifikasi dan penilaian ini dilakukan oleh kementerian dan provinsi. "Setelah clear akan menjadi Keluarga Sadar Hukum Anubhawa Sasana," tuturnya. Sebagai informasi, pemantauan dan evaluasi hasil capaian desa/kelurahan sadar hukum berlangsung setiap tiga tahun.

Dalam evaluasi, empat dimensi kriteria sadar hukum menjadi bahan penilaian. Pertama, dimensi akses informasi hukum, yakni konsistensi kegiatan penyebarluasan informasi hukum terhadap kadarkum melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung.

Kedua dimensi akses implementasi hukum, yaitu konsistensi keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dimensi akses keadilan terkait konsistensi layanan bantuan hukum, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non-litigasi di masyarakat.

Terakhir, dimensi akses demokrasi regulasi. Artinya, konsistensi kegiatan melibatkan peran partisipasi aparat desa/kelurahan hingga masyarakat dalam menjalankan program pemerintah. Eliz menambahkan, wali kota juga menerima penghargaan dari Kemenkumham selaku kadarkum di Balikpapan.

Ini berdasarkan data Kemenkumham. Dia berharap, provinsi bisa membantu proses tersebut. "Karena harus ditetapkan dengan putusan gubernur untuk diusulkan ke tingkat nasional," tuturnya. Sebagai informasi, setiap kadarkum memiliki 25 orang anggota. (ms/ki15)

**DINA ANGELINA**

dinaangelina6@gmail.com